

---

## Implementasi *Open Government Data* oleh Pemerintah Kota Bandung

Fhikri Fhutera Yudan\*<sup>1</sup>, Muhammad Arief Virgy<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Departemen Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Padjadjaran

<sup>2</sup> Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Padjadjaran

**Abstract.** This article aims to describe and analyze how the implementation of Open Government Data by the Government of Bandung City is viewed from the theory of implementation of Open Government Data from research by Azmi Omar, Julian M. Bass, and Peter Lowit. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out through literature study, observation, interviews, and documentation. The technique of determining informants was carried out purposively. The results showed that based on the four dimensions of the implementation of Open Government Data proposed by Azmi Omar et al, there are several things that need to be improved, such as community involvement in making datasets which is still minimal, public awareness of the importance of open data, the capacity of all Bandung City Government agencies to utilize manufacturing technology. data, as well as collaboration from parties in charge of observing the journey of Open Data Bandung. Researchers suggest that in order for the implementation of Open Government Data to run better, it is necessary to form a formal cooperation agreement with external parties as data producers and also to build special facilities for Open Data Bandung City so that the running of open government data in Bandung City can run effectively. **Keywords:** Implementation, Open Government Data; Open Data, Government Data; Bandung City

**Abstrak.** Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana implementasi *Open Government Data* oleh Pemerintah Kota Bandung ditinjau dari teori implementasi *Open Government Data* dari penelitian Azmi Omar, Julian M. Bass, dan Peter Lowit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan empat dimensi pelaksanaan *Open Government Data* yang dikemukakan Azmi Omar dkk, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti keterlibatan masyarakat dalam pembuatan dataset yang masih minim, kesadaran masyarakat tentang pentingnya *open data*, kapasitas seluruh instansi Pemerintah Kota Bandung untuk memanfaatkan teknologi pembuatan data, serta kolaborasi dari pihak-pihak yang bertugas mengamati keberjalanan Open Data Kota Bandung. Peneliti menyarankan bahwa agar pelaksanaan *Open Government Data* dapat berjalan lebih baik maka perlu dibentuknya perjanjian kerjasama formal dengan pihak eksternal sebagai produsen data dan juga dibangunnya fasilitas khusus bagi *Open Data* Kota Bandung sehingga berjalannya *open government data* di Kota Bandung dapat berjalan dengan efektif.

**Kata Kunci:** Implementasi, *Open Government Data*; *Open Data*, Data Pemerintah; Kota Bandung

Received: 07/12/2020

Revised: 16/02/2021

Accepted: 01/03/2021

---

**\*Korespondensi:**

Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran  
Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec.  
Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363  
Email: fhikriyudan@gmail.com

## PENDAHULUAN

**P**erkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau *electronic government* dalam pemerintahan membuat *open government* semakin berkembang. *Open data/open government data* atau jika diterjemahkan yaitu keterbukaan data/keterbukaan data pemerintah dikembangkan dari konsep *open government*. *Open government data* merupakan sebuah doktrin pemerintahan yang terbuka mengenai data-data yang dimilikinya untuk hal-hal tertentu sehingga publik dapat dengan bebas menggunakan data tersebut. Keterbukaan mengenai data ini selain memang sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas tetapi juga harapannya dapat digunakan oleh akademisi, pebisnis, birokrat, profesional dan kalangan lainnya untuk selain mengembangkan keahlian dibidang masing-masing juga untuk diskusi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah.

Dirangkum dari Agung Indrajit (2018: 249), *open government* dan *open government data* tidak dapat dipisahkan ketika kita ingin berbicara mengenai keterbukaan informasi kepada publik oleh pemerintah. Di Indonesia upaya untuk menerapkan konsep *open government* dimulai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan kemudian melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan adanya klausul dalam UU 14 2008 tentang KIP pada Bagian Keempat yaitu Kewajiban Badan Publik di Pasal 8, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Bagian Ketiga yaitu tentang Sistem Informasi pelayanan Publik di Pasal 23, terjadi sebuah perubahan dalam aksesibilitas data, sebelumnya data tertutup dan baru dibuka ke publik ketika diminta, sekarang data tersebut harus terbuka secara langsung tanpa harus adanya permintaan terlebih dahulu. Kemudian juga dalam UU KIP ini berbagai lembaga pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah didorong untuk menggunakan teknologi digital dalam publikasi dari data-data terkait. (Indrajit, 2018:249)

Berdasarkan Agung Indrajit (2018:249), pada tahun 2011 Indonesia bersama dengan beberapa negara lainnya seperti Amerika Serikat, Brasil, Meksiko, Inggris, Norwegia, Afrika Selatan, dan Filipina memprakarsai terbentuknya inisiatif *Open*

*Government Partnership* (OGP). Program ini merupakan sebuah inisiatif untuk pemerintah agar dapat berkomitmen dalam meningkatkan transparansi, mengembangkan komunitas, memerangi korupsi, dan menerapkan teknologi baru untuk menguatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Indrajit, 2018:250). Indonesia kemudian menindaklanjuti dengan meluncurkan gerakan *Open Government Indonesia* (OGI) pada Januari 2012 oleh Wakil Presiden Budiono pada waktu itu di Istana Presiden. (Hendrawan, 2019)

Pada bulan Desember 2015 Pemerintah Kota Bandung meluncurkan portal *open data* yang dapat diakses di <http://databandung.go.id> bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Internasional 11 Desember 2015. Website ini berupa portal *open data* yang bisa diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan berbagai macam informasi. Walikota Kota Bandung saat itu Ridwan Kamil menyatakan bahwa portal data ini dibuat atas dasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Perdana, 2015). *Open Data* Kota Bandung itu sendiri adalah sebuah inisiatif dan komitmen dari Pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan Bandung Juara dan Bandung Smartcity. Adanya *Open Data* Kota Bandung merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan perbaikan atas data yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung. Program *Open Data* Kota Bandung sendiri dinaungi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. (*Open Data Kota Bandung*, 2019)

Dalam perjalanan pelaksanaan *Open Data* Kota Bandung yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun masih terdapat permasalahan. Seperti yang dikemukakan dalam *self assessment Roadmap Open Data* Kota Bandung 2016-2018 terdapat kesenjangan antara kenyataan di lapangan dan pencapaian yang diinginkan untuk dicapai dalam *roadmap*. Kesenjangan yang dimaksud meliputi:

No	Aspek	Kesenjangan
1	Tata Kelola	Minimnya pelaksanaan proses pembuatan dataset
		Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya <i>open data</i>

No	Aspek	Kesenjangan
		Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembuatan dataset masih minim
2	Teknologi	Teknologi pembuatan data telah tersedia namun belum mampu dilakukan oleh seluruh Dinas
		Belum seluruh Dinas mampu melakukan komputerasi data, terutama untuk data yang akan dibuka
3	Sumber Daya Manusia	Keaktifan Petugas Data dan Informasi masih belum terjadi di seluruh SKPD
		Belum tersedia <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) untuk penilaian kinerja
		Belum ada rancangan penilaian dan monitoring kinerja
		Belum semua Petugas Data dan Informasi memiliki keterampilan yang memadai dalam melaksanakan alur kerja pengelolaan data ( <i>hardskill</i> )
4	Organisasi	Belum terdapat kolaborasi dari pihak-pihak yang bertugas mengamati keberjalanan kolaborasi
		Belum terdapat pembagian tugas antara Diskominfo dan Bappeda

Sumber: Safaria, dkk 2019 dan Safaria, dkk, 2018

Untuk mewujudkan implementasi *open government data* yang efektif di Kota Bandung maka dibutuhkan operasionalisasi yang baik dalam implementasinya, sehingga apa yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam inisiatif *Open Data* dapat terwujud dengan baik. Di dunia digital saat ini, data adalah minyak bumi baru (Bhageshpur, 2019) yang bila diolah dengan baik akan menjadi sumberdaya yang

berharga baik bagi pemerintah maupun oleh masyarakat luas, seperti menciptakan nilai tambah ekonomis dan sosial dengan dibukanya dataset tertentu (Jetzek, dkk, 2012). Oleh karena itu, implementasi dalam penyelenggaraan *Open Government Data* harus bisa dilaksanakan secara efektif.

Untuk menganalisa permasalahan implementasi *Open Government Data* oleh Pemerintah Kota Bandung dengan lebih mendalam maka peneliti menggunakan teori implementasi *open government data* yang berasal dari penelitian Azmi Omar, Julian M. Bass, dan Peter Lowit dari The Robert Gordon University, Skotlandia yang melaksanakan penelitian tentang implementasi *open government data* dengan penelitiannya yang berjudul “*A Grounded Theory of Open Government Data: A Case Study in The UK*”. Peneliti menggunakan teori ini, karena teori ini dianggap cocok untuk dapat menjelaskan permasalahan dalam implementasi *open government data* di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan perspektif lain sesuai dengan dimensi dari teori tersebut yaitu *data sharing*, *standardization*, *awareness*, dan *government responsibility*.

Selain itu, sebagai gambaran terkait penelitian mengenai *Open Government Data*, peneliti melakukan studi pustaka terhadap penelitian yang serupa. Pertama, penelitian dari Martin, Rosario, & Perez (2015) yang menganalisa bagaimana kualitas dari berbagai portal *open government data*. Dikemukakan bahwa kualitas dari portal *open government data* itu sendiri dipengaruhi oleh kapasitas ekonomi dari suatu negara dan juga masyarakat yang lebih banyak menggunakan internet maka kualitas dari *Open Government Data* cenderung lebih tinggi.

Kedua, penelitian dari Soegiono (2018) yang menyelidiki ketidakterikatan digital antara inisiatif *open government data* dengan masyarakat dalam *open government* dengan studi kasus inisiatif *open government data* milik Pemerintah Pusat Indonesia yaitu Satu Data Indonesia. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat ketidakterikatan dalam implementasi *open data* yang dipengaruhi oleh faktor tidak relevan dan tidak jelasnya kerangka regulasi, kebingungan dalam menentukan tujuan, kurangnya infrastruktur data, dan terbatasnya literasi digital.

Ketiga, penelitian dari Ruijter dkk (2018) yang mencoba memahami bagaimana penggunaan dari *open data* melalui perspektif praktikal. Berdasarkan penelitian ini

dapat dilihat bahwa tidak adanya kerangka kognitif bersama untuk memahami *open data* dan kurangnya dataset yang berkualitas dapat menghambat proses pembelajaran yang kolaboratif.

Keempat, penelitian dari Wirtz, Weyerer, & Rosch (2017) yang menganalisa bagaimana ekspektasi dari masyarakat terhadap *open government data*. Ditemukan terdapat beberapa faktor yang memengaruhi secara signifikan dari bagaimana intensi penggunaan dari *open government data* yaitu kemudahan penggunaan, kegunaan, dan transparansi. Lalu, ekspektasi partisipasi dan kolaborasi juga turut memengaruhi.

Kelima, penelitian dari Gomes & Soares (2014) yang menganalisa bagaimana perbedaan dalam inisiatif *open government data* antara negara di utara dan selatan Eropa melalui portal *open government data* dari enam negara. Penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan dalam penggunaan kembali dari dataset yang tersedia, yang kemungkinan disebabkan oleh adanya perbedaan dari tradisi dan pola pikir kultur dalam hal privasi data.

Keenam, penelitian dari Jetzek, Avital, & Bjorn-Andersen (2012) yang meneliti tentang nilai ataupun keuntungan dari adanya *open government data*. Dikemukakan bahwa inisiatif *open government data* kemungkinan akan menciptakan nilai ekonomis dan sosial untuk beberapa dataset, sehingga keuntungan finansial secara langsung dari dataset ini akan melebihi biaya dari inisiatif *open government data* diawal. Peningkatan transparansi, efisiensi kegiatan pemerintah, partisipasi publik, dan kegiatan wirausaha, inisiatif *open government data* akan menciptakan nilai dan menghasilkan keuntungan.

Ketujuh, penelitian dari Yang, Lo, & Shiang (2015) yang meneliti tentang faktor yang memengaruhi inisiatif *open government data* di Taiwan. Dalam penelitian ini ditemukan ada empat faktor yang memengaruhi inisiatif *open government data* yaitu teknologi, organisasi, regulasi dan kebijakan, serta lingkungan. Faktor utama yang paling berpengaruh adalah regulasi dan kebijakan disusul oleh faktor organisasi dan lingkungan sebagai faktor sekunder, dan kemudian faktor teknologi yang paling mudah untuk diselesaikan jika sumberdaya yang dituangkan ke faktor tersebut mencukupi.

Kedelapan, penelitian dari Safaria dkk (2018) yang meneliti tentang bagaimana manajemen inovasi *open data* dalam kerangka layanan informasi publik di Pemerintah Kota Bandung. Berdasarkan penelitian ini, dapat dilihat bahwa terdapat permasalahan dalam inisiatif *open data* di Kota Bandung ditinjau melalui perspektif manajemen inovasi. Dalam tahap *unfreezing*, pengembangan kapasitas sumber daya manusia kurang. Untuk tahap *moving*, anggaran tidak memadai. Terakhir, di tahap *refreezing* adanya ketidaktegasan dalam mekanisme koordinasi dan koordinasinya itu sendiri.

Terakhir, penelitian dari Safaria dkk (2019) yang meneliti implementasi program *open data* dengan menggunakan model inovasi kolaboratif. Dalam penelitian ini menemukan bahwa program *open data* belum efektif karena tidak adanya integrasi dengan Layanan Informasi Publik (LIP), yang kemudian berimplikasi pada mekanisme koordinasi dan komunikasi antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang tidak tegas dan tidak lancar. Permasalahan ini menimbulkan adanya perbedaan pandangan atas diseminasi informasi yang dipublikasikan.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif (Suryabrata, 2019: 76) dengan pendekatan kualitatif (Moleong, 2007:6). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (Nazir, 1998:111) dan studi lapangan yang terdiri dari wawancara (Suwartono, 2014:50) dan dokumentasi (Hikmawati, 2017:84). Penentuan informan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan teknik *purposive* di mana narasumber dipilih berdasarkan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010: 96). Berdasarkan pertimbangan, informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Data dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung karena peneliti menganggap beliau berkompeten dan mengetahui tentang dimensi *Government Responsibility*, *Data Sharing*, *Standardization*, dan *Awareness* dalam implementasi *open government data* sebagai organisasi pemerintah yang menjadi operator. Kemudian informan lainnya adalah Tune Map Indonesia yang dipilih sebagai informan untuk melihat bagaimana *Government Responsibility*, *Data Sharing*, *Standardization*, dan *Awareness* dari Tune Map Indonesia terhadap

implementasi *open government data* sebagai organisasi non pemerintah yang memproduksi data dan bekerjasama dengan operator *open data*. Guna mendapatkan validasi data yang dapat dipercaya, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber (Sugiyono, 2018:191). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi (dalam Sugiyono, 2018:133-142). Lama waktu penelitian dilaksanakan dari mulai bulan September 2019 sampai dengan Juni 2020.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menginisiasi adanya Open Data Kota Bandung dengan visi untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan inovasi di Kota Bandung. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan di mana tidak tercapainya indikator yang diinginkan dalam *Roadmap* Open Data Kota Bandung 2016-2018. Tidak tercapainya indikator ini kemudian dapat ditelaah lebih lanjut dengan menggunakan teori implementasi *open government data* yang dikemukakan oleh Azmi Omar, Julian M. Bass, dan Peter Lowit yang terdiri dari empat dimensi yaitu *data sharing* atau berbagi data, *standardization* atau standarisasi, *awareness* atau kesadaran, dan *government responsibility* atau tanggung jawab pemerintah. Adapun tidak tercapainya indikator yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan Open Data sesuai dengan keempat dimensi tersebut adalah sebagai berikut.

### *Data Sharing*

Dimensi pertama yaitu *data sharing* yang membahas tentang pengungkapan atau pun saling berbagi data antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Hal yang menjadi titik fokus dalam dimensi ini adalah tentang bagaimana data dibagikan antar organisasi. Selain itu, dimensi ini juga berfokus pada bagaimana pelibatan organisasi di luar pemerintahan dalam berbagi data, kemudian tentang keamanan, akurasi, kualitas, serta keutuhan dari data itu sendiri dalam *open data*.

Dalam hal pelaksanaan berbagi data, *Open Data* Kota Bandung bertindak sebagai tempat di mana data dibagikan dari produsen data. Selanjutnya? Produsen data akan memproduksi data sesuai dengan ketentuan tertentu lalu diberikan kepada Bidang Data dan Statistik untuk kemudian ditampilkan di website *Open Data* Kota Bandung dengan ketentuan tertentu sesuai dengan standarisasi (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020). Pada dasarnya data-data yang diberikan oleh produsen data kepada Bidang Data dan Statistik merupakan data yang sudah memenuhi standar atau pun dapat dipublikasikan secara luas sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada seperti dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Open Data* Kota Bandung bertindak sebagai media untuk mengagregasi data-data yang diproduksi oleh berbagai produsen data ke dalam satu tempat. (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020)

*Data sharing* dalam sistem *open data* pada dasarnya tidak tertutup hanya kepada data yang diproduksi oleh lembaga-lembaga di pemerintahan, tetapi juga *data sharing* dapat dilaksanakan dengan pihak di luar pemerintah misalnya dengan lembaga swadaya masyarakat atau pun organisasi lainnya. Dalam hal kerjasamanya dengan pihak eksternal pemerintahan, *Open Data* Kota Bandung melaksanakan dua macam kerjasama. Pertama yaitu dengan mengadakan kompetisi pengolahan data, kedua yaitu dengan berkolaborasi bersama organisasi non pemerintah. (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020)

Salah satu pihak eksternal pemerintah yang berkolaborasi dengan *Open Data* Kota Bandung adalah Tune Map. Fokus utama dari Tune Map ini adalah melakukan pemetaan mengenai trotoar yang aksesibel bagi tunanetra. Selain itu, Tune Map juga pada saat ini sedang mengembangkan aplikasi yang dinamakan Tune Map. Aplikasi ini nantinya akan memudahkan sukarelawan untuk dapat memetakan kondisi trotoar sehingga nantinya pengguna aplikasi ini yaitu orang dengan tunanetra dapat bernavigasi atau berjalan secara mandiri melewati trotoar dengan bantuan dari aplikasi Tune Map. Bisa dilihat juga, bahwa Tune Map ini merupakan produsen data potensial yang berkaitan dengan kondisi trotoar khususnya trotoar dengan aksesibilitas yang baik bagi tunanetra. (G.N. Dwijayati, wawancara pribadi, 27 Mei 2020)

*Data sharing* antara Tune Map dengan *Open Data* Kota Bandung sudah dilaksanakan. Sayangnya kolaborasi yang dilaksanakan oleh *Open Data* Kota Bandung dan Tune Map belum diformalkan dengan perjanjian resmi. Kemudian potensi Tune Map sebagai produsen data pun bagi *Open Data* Kota Bandung belum terealisasi. *Open Data* Kota Bandung di sini hanya terlibat sebagai jembatan dari produsen data yaitu Tune Map dengan dinas terkait yang menangani trotoar di Pemerintah Kota Bandung. (G.N. Dwijayati, wawancara pribadi, 27 Mei 2020)

Praktek dari kolaborasi antara *Open Data* Kota Bandung dengan Tune Map dilaksanakan dengan cara Tune Map menyediakan data aksesibilitas trotoar. Dalam data ini terdapat data-data lagi berupa data tentang lokasi dan jenis hambatan yang kemudian dianalisis oleh Tune Map. Setelah dianalisis, data ini kemudian diberikan kepada *Open Data* Kota Bandung, dengan harapan bahwa data ini akan membantu dalam meningkatkan fasilitas trotoar di Kota Bandung (G.N. Dwijayati, wawancara pribadi, 27 Mei 2020). Data dari Tune Map tersebut sayangnya belum dapat diakses oleh masyarakat luas melalui Portal *Open Data* Kota Bandung atau portal lainnya milik pemerintah, Sehingga masyarakat biasa di luar dari organisasi Tune Map atau pun organisasi pemerintah terkait yang diberikan datanya oleh Tune Map, belum dapat melihat data tersebut dengan bebas.

Perihal apakah kolaborasi atau *data sharing* antara lembaga pemerintah dengan organisasi non pemerintah diperlukan, pihak Tune Map menyatakan bahwa organisasi non pemerintah khususnya Tune Map melihat bahwa pelibatannya dalam *open data* memang diperlukan. Hal ini dikarenakan adanya data yang tidak dimiliki atau tidak dipublikasikan dari pihak pemerintah bagi Tune Map, khususnya data tentang aksesibilitas trotoar. Kemudian, karena yang memiliki wewenang dalam memperbaiki, membangun, serta merubah fasilitas publik adalah pemerintah itu sendiri, maka tindak lanjut setelah adanya *data sharing* ini akan menjadi penting (G.N. Dwijayati, wawancara pribadi, 27 Mei 2020).

Kemudian dalam pelaksanaan *open government data* ini hal yang menjadi perhatian adalah keamanan dari data yang dipublikasikan dalam portal. Di mana produsen data baik itu organisasi dalam pemerintah atau pun di luar pemerintah harus merasa aman dalam berbagi data. Secara infrastruktur, perangkat keras

penunjang Portal Data Kota Bandung pada tahun 2018 sudah dilakukan evaluasi untuk mengukur tingkat keamanannya. Hasilnya, Portal Data Kota Bandung mendapat nilai 3 dari 5. Pada evaluasi yang sama, tim *Open Data* Kota Bandung menerima rekomendasi untuk meningkatkan keamanan perangkat kerasnya. (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020).

Akurasi dari data yang diproduksi oleh produsen di awal dengan apa yang ditampilkan dalam Portal Data Kota Bandung menjadi hal yang penting. Bukan hanya bagi pengakses data, tetapi juga oleh produsen data asli. Open Data Kota Bandung selaku agregator dari produsen data mencantumkan sumber data dan juga waktu data tersebut terakhir dimodifikasi. Ini akan membantu para pengakses data maupun para produsen data awal. Bagi pengakses, hal ini bisa memperlihatkan apakah data yang mereka akses sudah merupakan data yang terkini. Kemudian, bagi produsen data, mereka dapat melihat apakah data yang mereka produksi sudah sesuai atau pun tidak dengan data yang dimiliki oleh mereka sendiri (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020).

**Gambar 1.**  
**Dataset Jumlah Dokter di Fasilitas Kesehatan Kota Bandung**

The screenshot shows the Open Data Portal interface for Kota Bandung. The main title is 'Jumlah Dokter di Fasilitas Kesehatan Kota Bandung'. Below the title, there is a description: 'Dataset ini berisi data Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi Menurut Sarana Pelayanan Kesehatan di Kota Bandung'. Under 'Data and Resources', there are four entries for the years 2015, 2016, 2017, and 2018, each with an 'Explore' button. The 'Additional Info' table provides metadata for the dataset.

Field	Value
Source	Dinas Kesehatan
Author	Open Data Kota Bandung
Maintainer	Open Data Kota Bandung
Last Updated	June 8, 2020, 04:43
Created	July 27, 2017, 02:28

Sumber: Portal Data Kota Bandung. Diakses pada 8 Juni 2020 pukul 17:42 WIB

Dapat dilihat pada Gambar 1 dalam dataset “Jumlah Dokter di Fasilitas Kesehatan Kota Bandung”, Data ini diproduksi oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung, kemudian terakhir dimodifikasi oleh *Open Data* Kota Bandung pada tanggal 8 Juni 2020 pukul 04:43 WIB. Adanya informasi ini akan memudahkan berbagai pihak untuk dapat memverifikasi data yang ada dalam Portal Data Kota Bandung.

Data pun tidak serta merta diunggah ke dalam sebuah portal *open data*, tetapi harus pula diperhatikan kualitas dari data tersebut dan juga keutuhan dari data itu sendiri. Kualitas dan keutuhan yang dimaksud di sini adalah bagaimana pengakses dari data tersebut bisa menggunakan data yang ada dengan kualitas tertentu terhadap semua data sehingga tidak adanya perbedaan yang mencolok bagi pengakses data. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan kualitas data melalui pemberlakuan standarisasi format data.

Tentang kualitas dari data, *Open Data* Kota Bandung menugaskan *data administrator* sehingga data yang ada di Portal Data Kota Bandung dapat memenuhi standar *Comma Separated Value* atau CSV. Adapun yang dimaksud dengan *Comma Separated Value* itu sendiri adalah format sederhana untuk mewakili susunan persegi (matriks) dari nilai numerik dan tekstual (*simple format for representing a rectangular array (matrix) of numeric and textual values*) (Library of Congress Collection, n.d). Dengan menggunakan standar CSV ini, maka pengakses data yang membutuhkan data akan mendapatkan data tersebut dengan standar baik yang dapat diterima oleh para pengolah data. Dalam menjaga keutuhan datanya, pihak *Open Data* Kota Bandung juga menyatakan bahwa ketika proses *data cleaning* dilaksanakan, tidak akan mempengaruhi isi atau pun fungsi dan tujuan data karena metadata tetap diperhatikan. (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020).

Kesimpulan yang dapat ditarik di sini adalah bahwa dalam hal dimensi implementasi *data sharing*, *Open Data* Kota Bandung bertindak sebagai agregator dari berbagai dataset yang diproduksi oleh lembaga lain yang nantinya akan diunggah ke dalam Portal Data Kota Bandung. Adanya Portal *Open Data* ini dapat merevolusi konsep akses online ke data, mengingat kegunaannya dan kemungkinan dari data-data ini untuk digunakan kembali data nantinya oleh pemangku kepentingan yang

berbeda (Martin, dkk: 2015:11). Sebagai agregator, *Open Data* Kota Bandung melaksanakan tugasnya dengan dua cara yaitu secara aktif di mana *Open Data* Kota Bandung meminta data kepada lembaga terkait, kemudian secara pasif di mana *Open Data* Kota Bandung mengambil data yang sudah tersedia di masing-masing dinas secara mandiri.

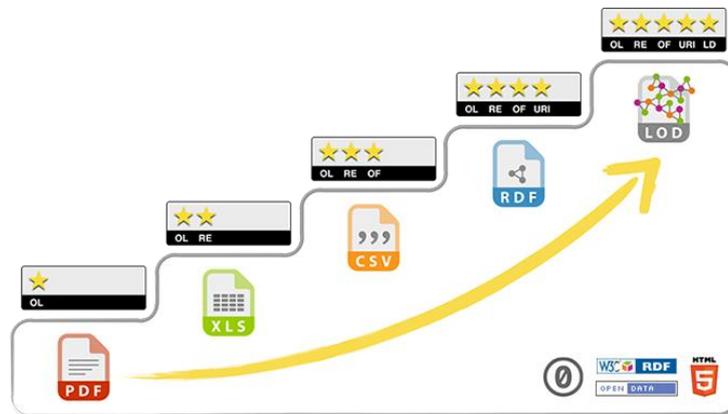
*Data sharing* yang ditampilkan dalam portal masih terbatas kepada data yang diproduksi oleh organisasi yang ada di dalam internal Pemerintah Kota Bandung sendiri. Kolaborasi dengan organisasi di luar pemerintah sudah dilaksanakan tetapi belum sampai ke tahap di mana organisasi tersebut menjadi produsen data yang ditampilkan dalam portal. Produksi data dari inisiatif *Open Data* Kota Bandung oleh organisasi pemerintah sendiri dapat menguatkan hubungan antar organisasi dalam jangka panjang (Yang, dkk, 2019:390). Jika organisasi yang berpartisipasi dalam *data sharing* ini rendah maka akan menimbulkan keterikatan antara inisiatif *open data* dan masyarakat yang menurun (Soegiono, 2018:48). Kemudian ditampilkannya data-data itu penting, khususnya yang bernilai tinggi, meskipun tidak digunakan akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat nantinya (Gomes & Soares, 2014:39). Lalu, terdapat permasalahan *Open Data* Kota Bandung dalam kolaborasinya yang lebih berperan hanya sebagai jembatan antara organisasi non pemerintah dengan dinas terkait yang berhubungan dengan fokus dari organisasi non pemerintah tersebut. Implementasi *data sharing* secara teknis dalam hal keamanan sudah dilaksanakan sesuai standar dengan ketentuan perundang-undangan sehingga privasi dari isi data akan terjaga bila itu menyangkut individu. Dalam hal akurasi, yang menjadi terpenting adalah waktu dan juga sumber data itu sendiri untuk dapat ditampilkan kepada pengakses data, sehingga dataset tersebut dapat diverifikasi kepada pihak terkait. Untuk kualitas dan keutuhan sudah ada standar minimal yaitu CSV (*comma separated value*) dan teknik *data cleaning* yang mempertimbangkan metadata dari dataset.

### **Standardization**

Dimensi kedua yaitu *standardization* yang membahas tentang bagaimana standarisasi dalam sistem *open data*. Hal yang menjadi titik fokus dalam dimensi ini adalah tentang bagaimana standarisasi data, format data, sistem kerja, dan juga aplikasi dalam *open data*. Dalam hal pelaksanaan standarisasi, *Open Data* Kota

Bandung mengacu pada standar bintang tiga yang dipublikasikan oleh Tim Berners Lee yaitu format terbuka dan mudah untuk di produksi ulang. (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020).

**Gambar 2.**  
**Standar Lima Bintang Open Data Tim Berners Lee**



Sumber: [5stardata.info/en/](https://5stardata.info/en/)

Tim Berners Lee menyatakan bahwa ada 5 standar bintang dalam *Open Data* (<https://5stardata.info/en/>). Bintang pertama yaitu bahwa apa pun jenis datanya asalkan berada dalam web atau portal data yang dapat diakses dan memiliki lisensi terbuka misalnya dengan format PDF. Bintang kedua yaitu bahwa data yang dibuka haruslah berstruktur misalnya dengan format XLS yang dapat diolah. Bintang ketiga yaitu bahwa data-data yang dibuka haruslah memakai format terbuka seperti CSV dan tidak berformat data yang hanya bisa dibuka oleh satu aplikasi tertentu seperti XLS yang ada “hak milik” oleh pihak tertentu dalam hal excel ini dimiliki oleh Microsoft Excel. Bintang keempat yaitu bahwa URI (*Uniform Resource Identifier*) harus digunakan untuk data sehingga pengakses data dapat menunjuk kepada data yang ditampilkan dalam *open data*. Bintang kelima yaitu bahwa data harus dapat dihubungkan (*linked*) dengan data lain sehingga dapat memberikan konteks lebih dalam bagi pengakses data.

*Open Data* Kota Bandung itu sendiri menggunakan dua format data, 90% data yang terpublikasi di Portal Data Kota Bandung tersedia dalam format CSV. Untuk data spasial, menggunakan format GeoJSON.. (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020). Dengan menggunakan data CSV dan juga GeoJSON, *Open Data* Kota Bandung

sudah memenuhi standar bintang tiga Tim Berners Lee, di mana format data bersifat *open license*.

Standar yang ditetapkan oleh *Open Data* Kota Bandung ini seharusnya berlaku untuk semua data yang ditampilkan dalam Portal Data Kota Bandung. Salah satu organisasi non pemerintah yang berkolaborasi dengan *Open Data* Kota Bandung yaitu Tune Map yang dalam pelaksanaan kolaborasinya tidak ada standarisasi data secara formal. Namun, tim *Open Data* Bandung meminta format data RAW dalam bentuk XLS, selain ini Tune Map juga memberikan laporan analisis data secara berkala (G.N. Dwijayati, wawancara pribadi, 27 Mei 2020). Dari sini bisa dilihat bahwa dengan tidak adanya perjanjian formal maka tidak ada standarisasi yang formal juga. Akan tetapi bisa dilihat bahwa format data yang diminta oleh *Open Data* Kota Bandung berstandar bintang dua dari standarisasi Tim Berners Lee, selain itu juga laporan yang berbentuk analisis rutin diberikan kepada *Open Data* Kota Bandung. Standar bintang dua sebenarnya tidak ada masalah karena memang data yang diproduksi oleh Tune Map tidak ditampilkan dalam Portal Data Kota Bandung untuk dapat diakses, sehingga permintaan format data dapat dilaksanakan dengan keinginan dari *Open Data* Kota Bandung.

Kemudian sistem kerja dari *Open Data* Kota Bandung itu sendiri terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu tahap pengumpulan/akuisisi data, lalu tahap pengolahan dan analisa data, terakhir yaitu tahap publikasi data (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020). Sistem kerja dari *Open Data* Kota Bandung ini dalam prakteknya dengan organisasi non pemerintah terlihat tidak jelas. Berkaitan dengan sistem kerjasama antara *Open Data* Kota Bandung, Tune Map masih bersifat informal, dan dalam kerjasama ini dilaksanakan audiensi secara regular 3/4 bulan sekali (G.N. Dwijayati, wawancara pribadi, 27 Mei 2020). Karena tidak adanya perjanjian kerja secara formal, maka sistem kerja pun tidak mendapatkan perhatian dan hanya ada audiensi secara berkala antara pihak Tune Map dengan pihak *Open Data* Kota Bandung.

Penggunaan aplikasi tidak dapat luput dalam dimensi standarisasi karena ketika aplikasi yang digunakan merupakan aplikasi yang eksklusif maka akan menimbulkan masalah terkait kolaborasi berbagai pihak dalam upaya mengimplementasikan *open government data* atau *open data* terutama tiadanya

keepakatan format data dan aplikasi yang digunakan oleh kedua pihak. *Open Data* Kota Bandung sendiri membagi dua aplikasi menjadi:

1. Tersedia dan dapat diunduh bebas
  - a. CKAN untuk Portal Data Kota Bandung
  - b. Tableau, alat bantu pengolahan data
  - c. OpenRefine, alat bantu pembersihan data
2. Dibuat oleh tim *Open Data* Kota Bandung
  - a. ARIMBI, Aplikasi Real Time Berbagi Informasi untuk mempublikasikan data yang bersifat real time.
  - b. Bandung City Dashboard, untuk mempublikasikan data dalam bentuk dashboard interaktif.
  - c. Sistem Pemantauan dan Evaluasi, untuk melakukan pemantauan ketersediaan, kelengkapan dan mengukur performa produsen data (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020).

Aplikasi di atas juga dapat dilihat dari sudut pandang lain, sehingga kategori bisa dibagi menjadi aplikasi untuk mengelola Portal Data Kota Bandung dan aplikasi yang menjadi sarana publikasi dari data yang tersedia. Penggunaan aplikasi yang bersifat *open license* oleh *Open Data* Kota Bandung akan memudahkan berbagai organisasi baik pemerintah maupun non pemerintah untuk dapat memiliki standar yang jelas sehingga sistem *open data* akan menjadi lebih baik. Kemudian adanya aplikasi dari pemerintah untuk sarana publikasi data yang terpadu akan membuat akses kepada data itu menjadi lebih mudah.

Tentang penggunaan aplikasi ini dengan organisasi non pemerintah khususnya untuk publikasi data akan memudahkan pengakses apabila data yang diproduksi oleh pihak organisasi non pemerintah dapat ditampilkan dalam aplikasi pemerintah. Perihal penggunaan aplikasi, Tune Map memiliki data dashboard sendiri, begitu pun *Open Data* Bandung. Pada saat ini, data mengenai aksesibilitas trotoar yang diproduksi oleh pihak Tune Map tidak dapat diakses dari aplikasi mana pun. Rencana untuk menampilkan data khususnya yang dikelola oleh pemerintah harus dapat direalisasikan segera sehingga masyarakat luas dapat mengakses data tersebut (G.N. Dwijayati, wawancara pribadi, 27 Mei 2020).

Kesimpulan yang dapat ditarik di sini, dalam perihal dimensi implementasi *standardization*, bahwa *Open Data* Kota Bandung telah mempunyai standarisasi yang jelas dengan diadopsinya standarisasi *open data* bintang tiga dari Tim Berners Lee. Jika portal *open data* dikembangkan ke level maksimalnya dan ke tingkat kualitas yang paling tinggi maka data tersebut harus terstandarisasi dengan jelas dan konsisten sehingga dapat dimanfaatkan kembali (Martin, dkk, 2015:11). Kemudian format data yang digunakan pun merupakan format data yang bersifat *open license* sehingga dapat memudahkan berbagai pihak untuk dapat memproduksi atau pun mengolah data yang dimiliki oleh *Open Data* Kota Bandung. Lalu, sudah ada adopsi sistem kerja yang terbagi menjadi *data driven* dan *problem driven*. Dalam hal penggunaan aplikasi, *Open Data* Kota Bandung mengelolanya menggunakan aplikasi yang terbuka sehingga akan memudahkan koordinasi. Kemudian, adanya aplikasi publikasi data yang terpadu akan memudahkan masyarakat untuk mengakses data disatu tempat dengan standar yang sama. Terdapat kekurangan dalam implementasi standarisasi, yaitu pada kolaborasi dengan organisasi di luar pemerintah, seperti dengan Tune Map. Permasalahan diawali dengan tidak adanya perjanjian kerja sama yang formal sehingga menjadikan standarisasi data, format data, sistem kerja, dan aplikasi yang digunakan oleh pihak pemerintah dan non pemerintah menjadi berbeda. Adanya standar definisi dari data dan informasi yang unik bagi petugas informasi atau data akan mengurangi adanya kebingungan (Soegiono, 2018:48). Dari hasil penelitian dapat kita lihat bahwa sudah ada standarisasi dalam inisiatif *Open Data* Kota Bandung tetapi tidak dipahaminya standar tersebut oleh pihak eksternal menjadikan standar tidak diketahui secara seragam.

### **Awareness**

Dimensi ketiga yaitu *awareness* yang membahas tentang bagaimana kesadaran publik dan Pemerintah tentang inisiatif *Open Data*. Kesadaran ini harus dipahami bahwa tidak hanya datang dari Pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat. Hal yang menjadi titik fokus dalam dimensi ini adalah tentang bagaimana sosialisasi dan pengetahuan tentang inisiatif *open data*.

Dalam hal pelaksanaan sosialisasi, *Open Data* Kota Bandung melaksanakan sosialisasi tersebut tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga sosialisasi dilakukan

kepada internal Pemerintah Kota Bandung. Sosialisasi kepada internal ini dilaksanakan dengan dua cara yaitu:

1. Visualisasi data dalam bentuk infografis melalui media sosial ataupun paparan dalam pertemuan sebagai materi untuk memberi pengetahuan bahwa datanya dipakai dan diperlukan dalam pengambilan kebijakan.
2. Penyampaian contoh-contoh analisa data dalam beberapa kegiatan rapat koordinasi dan teknis berkaitan dengan pengelolaan data (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020).

Penyampaian tentang inisiatif *Open Data* Kota Bandung kepada aparatur internal di Pemerintah Kota Bandung dengan berfokus kepada hasil analisa data dan visualisasi data akan membantu memberikan pemahaman kepada aparatur pemerintahan bahwa data yang dikoleksi, diproduksi, dan disebarluaskan selama ini memang memiliki manfaat dan tidak hanya sebagai hal rutin yang tidak penting.

Lalu, sosialisasi kepada masyarakat pun dilaksanakan oleh *Open Data* Kota Bandung melalui sosialisasi rutin ke kampus-kampus di Kota Bandung. Selain pada kampus, sosialisasi juga dilakukan kepada audiens yang lebih umum tersedia di aplikasi ARIMBI. Radio SONATA juga dimanfaatkan untuk mempromosikan inisiatif *Open Data* Kota Bandung secara lebih luas. Penargetan sosialisasi kepada kampus-kampus merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan kampus merupakan tempat banyaknya peneliti berada, sehingga adanya *Open Data* Kota Bandung akan membantu para peneliti untuk dapat mengakses berbagai data yang relevan dengan penelitiannya. Kemudian, sosialisasi kepada masyarakat umum dengan berfokus kepada aplikasi, seperti ARIMBI yang menampilkan data dasar akan membentuk masyarakat yang melek data (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020).

Perihal sosialisasi dari *Open Data* Kota Bandung kepada organisasi non pemerintah, *Open Data* Kota Bandung berkolaborasi dengan Tune Map mengadakan acara MapMyDay. Jika dilihat lebih lanjut acara ini bukan hanya sebuah sosialisasi belaka tetapi juga disematkan di dalamnya untuk dapat memproduksi data khususnya data tentang tingkat aksesibilitas dari trotoar untuk pejalan kaki. Data tersebut kemudian juga digunakan berkesinambungan dengan acara lain, yaitu

datathon sebuah acara kompetisi di mana data yang diproduksi di acara sosialisasi sebelumnya digunakan kembali untuk dapat digunakan sebagai dasar inovasi pemecahan masalah (G.N. Dwijayati, wawancara pribadi, 27 Mei 2020)

Lalu, berlanjut pada pengetahuan dari inisiatif *Open Data* Kota Bandung. Pengetahuan tentang inisiatif *open data* harus pula diketahui oleh internal pemerintah termasuk berbagai lembaga yang memproduksi data dan masyarakat atau organisasi non pemerintah yang juga dapat memproduksi data bagi sistem *open data*. Perihal pengetahuan dari inisiatif ini, *Open Data* Kota Bandung memiliki kegiatan bernama *Data Discovery Workshop (DDW)* di mana ini akan memberikan pengetahuan tentang inisiatif *Open Data* Kota Bandung, khususnya kepada petugas data dan informasi (Pedasi). Ini penting bagi internal pemerintah, karena pada dasarnya *open data* atau *open government data* mengharuskan dinas dalam pemerintah untuk dapat memproduksi, mengelola, dan membuka sebanyak mungkin data (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020).

Perihal pengetahuan tentang inisiatif *Open Data* Kota Bandung kepada organisasi non pemerintah seperti *Tune Map*, sudah cukup dikenal dan disosialisasikan secara baik karena ada audiensi secara reguler (G.N. Dwijayati, wawancara pribadi, 27 Mei 2020). Pengetahuan dari masyarakat ini khususnya oleh organisasi yang bisa membantu memproduksi data, harus dioptimalisasi sehingga inisiatif sistem *Open Data* Kota Bandung akan menjadi lebih baik.

Jumlah pengunjung pada situs Portal Data Kota Bandung dapat dilihat sebagai acuan bagaimana *awareness* inisiatif *Open Data* Kota Bandung di masyarakat secara luas. Total jumlah pengunjung selama 2019 adalah sebanyak 105.372 pengunjung. Jika dirata-ratakan, menjadi 8.781 kunjungan tiap bulannya dan sebanyak 288,7 pengunjung setiap harinya selama tahun 2019. Dari data pengunjung ini, kita bisa melihat bahwa terdapat kesadaran di masyarakat untuk mengakses Portal Data Kota Bandung (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020).

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah dalam hal dimensi implementasi *awareness*, *Open Data* Kota Bandung telah memiliki upaya sosialisasi yang jelas dengan adanya medium sosialisasi yang disesuaikan dengan target dari sosialisasinya tersebut. Mengundang partisipasi publik aktif dalam produksi data baru dan

pemanfaatan data yang sudah ada penting untuk dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan *awareness* ini (Martin, dkk, 2015:11). Adanya komunikasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya yang bermakna mengenai permasalahan publik juga relevan untuk *open government data* yang berkualitas tinggi (Ruijter, dkk, 2019:12). Pemerintah dapat merumuskan rencana aksi untuk inisiatif *open data* ini agar perusahaan, universitas, dan entitas lainnya yang memiliki kemampuan inovasi dapat mengembangkan data yang ada ini (Gomes & Soares, 2014:349). Lalu, dalam hal pengetahuan mengenai inisiatif *Open Data* Kota Bandung telah memiliki pula upaya yang jelas dengan adanya program atau kegiatan yang didesain untuk internal pemerintah dan juga eksternal non pemerintah. Meningkatnya literasi digital dalam *open data* ini dapat dicapai apabila partisipasi publik dan kolaborasi dengan berbagai sektor dibentuk dan difasilitasi, dalam mencapai ini dapat dilaksanakan dengan sosialisasi, penelitian tentang data, atau kompetisi (Soegiono, 2018:9). Faktor yang menjadi penting dalam digunakannya *open government data* adalah kemudahan penggunaan dan kegunaan, transparansi, partisipasi, dan kolaborasi akan menentukan bagaimana intensi masyarakat menggunakan *open government data* (Wirtz, dkk, 2017:577). Dari hasil penelitian dapat kita lihat bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang inisiatif *Open Data* Kota Bandung sudah dilaksanakan baik kepada pihak internal maupun pihak eksternal dari Pemerintah Kota Bandung, tetapi kemudian tidak adanya kesepakatan formal antara pemerintah dengan pihak eksternal menjadikan hal-hal yang bersifat teknis seperti standarisasi belum dapat diikuti secara jelas.

#### **Government Responsibility**

Dimensi keempat, yaitu *Government Responsibility* membahas tentang bagaimana kesadaran tentang pelaksanaan inisiatif *Open Data* oleh Pemerintah. Pemerintah sendiri memainkan peran penting dalam implementasi *Open Government Data* dengan memberikan dukungan kepada organisasi, menciptakan peluang, atau menyediakan sumber daya yang terlibat seperti dengan staf, uang, materi, hingga layanan. Hal yang menjadi titik fokus dalam dimensi ini adalah tentang bagaimana

dukungan dari pimpinan pemerintahan juga tentang bagaimana pengelolaan inisiatif *Open Data*.

Dalam hal dukungan dari pimpinan pemerintah, *Open Data* Kota Bandung untuk implementasi inisiatif *Open Data* Kota Bandung dan juga inisiatif Satu Data Indonesia dari Pemerintah Pusat sudah ada sejak 2015 dan diharapkan bahwa seluruh instansi untuk dapat mensukseskan *open government data* Kota Bandung dengan berpartisipasi serta tidak hanya membebankan kepada instansi tertentu. (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020)

Kemudian dukungan dari pimpinan pemerintah ini pun dirasakan oleh organisasi non pemerintah yang berkolaborasi dengan *Open Data* Kota Bandung, yaitu Tune Map. Dukungan pimpinan pemerintah dirasakan oleh Tune Map sangat baik. Dengan adanya kolaborasi, pihak Tune Map dapat menyampaikan hasil temuannya mengenai aksesibilitas trotoar di Kota Bandung ke berbagai instansi pemerintah yang memang berkaitan (G.N. Dwijayati, wawancara pribadi, 27 Mei 2020).

Data pemerintah perlu untuk dibuka kepada masyarakat dan juga organisasi non pemerintah. Adanya keterbukaan ini dapat membantu masyarakat untuk berkontribusi mencari solusi yang berdasarkan data. Pemerintah pun dapat terbantu dengan banyaknya masyarakat yang ikut mencari solusi yang tepat, beban kerja dari pemerintah pun dapat berkurang (G.N. Dwijayati, wawancara pribadi, 27 Mei 2020).

Inisiatif *Open Data* Kota Bandung ini perlu untuk terus dapat dilaksanakan secara penuh oleh pemerintah. Data yang ditampilkan pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya sehingga pelaksanaan secara penuh oleh pemerintah dari awal sampai akhir harus dapat dilakukan (G.N. Dwijayati, wawancara pribadi, 27 Mei 2020). Selain itu, mengelola inisiatif *Open Data* Kota Bandung tentunya harus berangkat terlebih dahulu dari dasar hukum di mana inisiatif ini sendiri dilaksanakan. *Open Data* Kota Bandung menyampaikan bahwa dasar hukum dari dilaksanakannya inisiatif *Open Data* Kota Bandung melekat dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika, pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 1393 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandung.” (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020).

Dalam mengelola inisiatif *Open Data* Kota Bandung, hal yang menjadi perhatian adalah tentang sumber daya dan fasilitas yang digunakan, bagaimana alokasi dari sumber daya manusia, kemudian juga tentang pelatihan. Adapun sumber daya yang digunakan oleh *Open Data* Kota Bandung yaitu:

1. *Brainware*, terdiri dari data administrator, *data analyst*, *business analyst*, *graphic designer*, pengelola data, pengolah data dan statistisi.
2. *Software*, terdiri dari Tableau, Microsoft Excel, XMind, Flourish Studio, Open Refine, Airtable, Navicat dan Sublime Text. (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020).

Untuk fasilitas apa saja yang digunakan, *Open Data* Kota Bandung tidak memiliki fasilitas khusus yang digunakan sehingga fasilitas yang digunakan adalah fasilitas yang disediakan untuk operasional dinas. *Data center* dan penunjang transaksi data secara besar belum tersedia, sampai saat ini fokus utama adalah pengelolaan data dan peningkatan kualitas datanya. Tidak adanya fasilitas khusus seperti *data center* dan sistem transaksi data maka yang dapat dilaksanakan hanyalah pengelolaan dan peningkatan kualitas data. Fasilitas khusus untuk menunjang operasionalisasi dari sistem *Open Data* Kota Bandung akan menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah jika ingin untuk dapat mengejar laju perkembangan teknologi yang ada di masyarakat (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020).

Untuk sumber daya manusia, *Open Data* Kota Bandung mengalokasikan 13 orang terdiri dari 9 Pegawai Negeri Sipil dan 4 Tenaga Ahli (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020). Struktur organisasi dari *Open Data* Kota Bandung itu sendiri merupakan struktur dari Bidang Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, sehingga *Open Data* Kota Bandung bukan lah suatu instansi independen, melainkan melekat dengan Bidang Data dan Statistik. Kemudian Tenaga Ahli yang berada dalam *Open Data* Kota Bandung atau Bidang Data dan Statistik ini sebenarnya dalam prakteknya dapat bekerja di seksi manapun dan tidak terikat pada satu seksi tertentu. (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020)

Lalu, pelatihan dari petugas *Open Data* Kota Bandung menjadi hal dasar yang harus dimiliki. Untuk melaksanakan pelatihan ini *Open Data* Kota Bandung menyelenggarakan DDW (*Data Discovery Workshop*) untuk seluruh Petugas Data dan

Informasi (Pedasi) yang ada di instansi pemerintahan sehingga *Open Data* Kota Bandung dapat berjalan sesuai dengan standar, materi yang disampaikan adalah pengenalan urusan dan tupoksi dinas, adanya pengenalan pengelolaan data dan pengenalan pengolahan data, serta penyimpanan data (R. Karlina, wawancara pribadi, 9 April 2020).

Kesimpulan yang dapat ditarik di sini adalah dalam hal dimensi implementasi *government responsibility*, *Open Data* Kota Bandung sudah memiliki dasar hukum yang jelas untuk dapat melaksanakan kegiatannya. Adanya peraturan yang jelas akan menghindarkan menurunnya keterikatan antara inisiatif *open data* dengan pihak yang berkepentingan (Soegiono, 2018:8). Faktor yang sangat berdampak dalam partisipasi berbagai organisasi dalam inisiatif *open data* adalah regulasi dan kebijakan (Yang, dkk, 2019:609). Dukungan dari pemerintah berbentuk sebuah komitmen sejak dimulainya inisiatif *Open Data* Kota Bandung. Pemerintah harus mempercayai bahwa para pemangku kepentingan dapat memberikan nilai yang nyata dan juga mengapresiasi perspektif dan partisipasi mereka agar inisiatif *open data* ini dapat berjalan dengan baik (Ruijter, dkk, 2019:13). Kemudian dalam hal sumber daya ada dua yang digunakan yaitu *brainware* dan *software* yang sayangnya tidak ada fasilitas khusus untuk dapat menunjang operasional dari *Open Data* Kota Bandung. Dari hasil penelitian ini dapat kita lihat bahwa Pemerintah Kota Bandung memberikan komitmen tanpa adanya atensi yang jelas seperti penyediaan fasilitas khusus dan juga tidak adanya kesepakatan kerjasama formal dengan pihak eksternal.

## KESIMPULAN

Ditilik dari empat dimensi implementasi *Open Government Data* oleh Pemerintah Kota Bandung, maka ada beberapa hal yang memerlukan perbaikan dari segi kolaborasi data sharing maupun kesepakatan formal dengan pihak eksternal, standarisasi format data, hingga infrastruktur penunjang pelaksanaan inisiatif *Open Data*. Untuk itu, Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan beberapa hal untuk memperbaiki implementasi inisiatif *Open Data* ini.

Pertama, Pemerintah Kota Bandung dapat menjalin kerja sama lebih banyak dengan organisasi eksternal lainnya agar data yang didapatkan lebih kaya sehingga

data yang dapat diakses oleh masyarakat lebih komprehensif. Kerja sama tersebut tentunya harus bersifat formal agar ada standarisasi terhadap sistem kerja, aplikasi yang dipakai, format data, publikasi data, produksi data, dan lain sebagainya dapat tercapai antara pihak pemerintah dengan pihak eksternal. Kedua, Pemerintah Kota Bandung dapat meningkatkan standarisasi penggunaan format data dari standar bintang 3 ke standar yang lebih tinggi agar dapat bersaing mengikuti perkembangan kemajuan implementasi *Open Government Data* dengan seluruh dunia. Ketiga, Pemerintah Kota Bandung lebih mengencangkan sosialisasi kepada pihak eksternal khususnya kepada calon produsen data eksternal agar pengetahuan yang lebih teknis dapat diketahui sehingga kolaborasi ke depan dapat berjalan dengan lebih mudah. Terakhir, Pemerintah Kota Bandung dapat meningkatkan infrastruktur penunjang pelaksanaan *Open Government Data* seperti *data center* serta fasilitas transaksi data antar organisasi guna memperluas fokus kerjanya terutama terhadap peningkatan kualitas data.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bhageshpur, Kiran. (2019). *Data Is The New Oil -- And That's A Good Thing*. Diakses di <https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2019/11/15/data-is-the-new-oil-and-thats-a-good-thing/?sh=2a20c4a73045> pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 01.20 WIB.
- Gomes, Alvaro., Soares, Delfina. (2014). Open government data initiatives in Europe: Northern versus southern countries analysis. *ACM International Conference Proceeding Series*, Hal. 342-350.
- Hendrawan, Arie. (2019). *Open Government: Perkembangan dan Masa Depan*. Diakses di <https://nasional.sindonews.com/read/1388938/18/open-government-perkembangan-dan-masa-depan-1553196647> pada 17 Oktober 2019 pukul 15.04 WIB.
- Hikmawati, F. (2017). *Metodologi Penelitian*. Depok: Raja Grafindo Persada.  
<https://5stardata.info/en/> diakses pada 10 Juni 2020 pukul 18.48 WIB.

- Indrajit, A. (2018). One Data Indonesia to Support the Implementation of Open Government Data in Indonesia. In B. van Loenen, G. Vancauwenberghe, & J. Crompvoets, *Open Data Exposed* (pp. 247-267). The Hague: T.M.C. Asser Press.
- Jetzek, T., Avital, M., & Bjørn-Andersen, N. (2012). *The Value of Open Government Data: A Strategic Analysis Framework*. Paper presented at 2012 Pre-ICIS Workshop, Orlando, Florida, United States.
- Kusnandar, Viva Budy. (2019). *Berapa Jumlah Penduduk Kota Bandung*. Diakses di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/17/berapa-jumlah-penduduk-kota-bandung-pada-17-oktober-2019-pukul-16.32-WIB>.
- Library of Congress Collections. Diakses di <https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000323.shtml> pada tanggal 9 Juni 2020 pukul 21:13 WIB.
- Martin, Alejandro Saez., Rosario, Arturo Haro De., & Perez, Maria Del Carmen Caba Perez. (2015). An International Analysis of the Quality of Open Government Data Portals. *Social Science Computer Review*, Vol. 34, No. 3, Hal. 298-311.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nazir, M. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Omar, A., Bass, J. M., & Lowit, P. (2014). A Grounded Theory Of Open Government Data: A Case Study In The UK. *UK Academy for Information Systems Conference Proceedings 2014*, (Hal. 1-22).
- Open Data Kota Bandung. Diakses di <https://opendatabdg.gitbook.io/dokumentasi/> pada 17 Oktober 2019 pukul 16.41 WIB.
- Perdana, Putra Prima. (2015). *Luncurkan Portal Open Data, Pemkot Bandung Siap Ditelanjangi*. Diakses di <https://nasional.tempo.co/read/727003/luncurkan-portal-open-data-pemkot-bandung-siap-ditelanjangi/full&view=ok> pada 17 Oktober 2019 pukul 16.16 WIB.
- Ruijter, Erna., Grimmelijsen, Stephan., van den Berg, Jochem., Meijer, Albert (2019). Open data work: understanding open data usage from a practice lens. *International Review of Administrative Sciences*, Vol. 86, No. 1, Hal. 3-19.

- Safaria, A. F., Muhtar, E. A., Irawati, I., & Widianingsih, I. (2018). Manajemen Inovasi Open Data Dalam Layanan Informasi Publik Pada Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 9, No. 2, Hal. 135-12.
- Safaria, A. F., Widianingsih, I., Muhtar, E. A., & Irawati, I. (2019). Model Inovasi Kolaboratif dalam Implementasi Program Open Data: Tantangan dan Manfaatnya bagi Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 9, No. 1, Hal. 9-20.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, S. (2019). *Metodologi Penelitian*. Depok: RajaGrafindo Perkasa.
- Suwartono. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Soegiono, Agie Nugroho. (2018). Investigating Digital (Dis)engagement of Open Government: Case Study of One Data Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 22, No.1, Hal. 36-51.
- Wawancara pribadi dengan Rina Karlina, Kepala Bidang Data dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, 9 April 2020.
- Wawancara pribadi dengan Gita Nofieka Dwijayati, Co-Founder dan Team Leader Tune Map, 27 Mei 2020.
- Wirtz, Bernd W., Weyerer, Jan C., Rosch, Michael. (2017). Open Government and citizen participation: an empirical analysis of citizen expectancy towards open government data. *International Review of Administrative Sciences*. Vol. 85, No. 3, Hal. 566-586.
- Yang, Tung-Mou., Lo, Jin., Shiang, Jing. (2019). To open or not to open? Determinants of open government data. *Journal of Information Sciences*, Vol. 41, No. 5, Hal. 596-612.